

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat (AS) adalah negara unik yang di dalamnya terdiri berbagai bangsa bersatu padu menjadi sebuah negara adidaya, yakni selalu berusaha menjadi penguasa dunia untuk menegakkan nilai-nilai Amerika (*American Values*) di seluruh muka bumi dengan dukungan ekonomi besar dan kekuatan militer raksasa. Dengan demikian, AS sering dituding banyak pihak menjalankan Kebijakan internasional “bermuka dua” atau standar ganda sebagaimana berkaitan dengan sikap AS terhadap Timur Tengah. Konon, salah satu pegangan kunci AS ialah apa yang disebut sebagai *minus malum*, yaitu harus memilih yang kurang buruk ketika menghadapi yang terburuk.

Kemudian untuk saat ini berkembang pula istilah baru yaitu inkonsistensi kebijakan AS, ini merupakan diskripsi dan persepsi masyarakat dunia terhadap AS masa kini, yakni Kebijakan Luar Negeri yang tidak sesuai dengan kesepakatan/keputusan awal internal baik eksekutif maupun legislatif pemerintah AS, inkonsistensi sangat berkaitan dengan berbagai kebijakan baik ekonomi, politik, militer dan lain-lain. Dari banyaknya kasus dan fénomena tentang inkonsistensi kebijakan luar negeri AS, maka penulis mendefinisikan sebagai Elastisitas Politik Luar Negeri AS di dalam prosesnya berhubungan langsung dengan pragmatisme yang merupakan *the way of life* bangsa Amerika.¹ AS juga mengakui bahwa politik luar negeri adidaya itu adalah pragmatisme dan AS selalu menjadi “pendamai”, pragmatisme mengajarkan betapa pentingnya pengalaman sebagai bagian dari perkembangan dan kemajuan hidup manusia.

¹ Albertine Minderop. 2006. *Pragmatisme-Sikap Amerika dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*; Ed .1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 89.

Kecenderungan atau idealnya Politik Luar Negeri AS adalah berusaha untuk menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah dengan mengupayakan proses demokratisasi terhadap kawasan-kawasan yang telah bergejolak, selain itu Amerika Serikat juga menaruh kekhawatiran terhadap potensi ancaman dari gerakan-gerakan Islam yang mengusung agenda Islam politik untuk menerapkan negara Islam. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering dibicarakan dalam lingkup ketegangan dialektik pola pragmatisme dan realisme Atau dengan kata lain, kebijakan luar negeri Amerika berkuat antara politik riil dan Ideologi. Bagi para pendukung dan praktisinya, realisme adalah sebuah pemahaman yang tertib, jernih, dan tegas tentang perumusan kebijakan yang didasari pada kepentingan negara yang didefinisikan dengan baik.²

Sebagai negara liberal dan disaat ini eksekutif dikuasai Demokrat yakni presiden Barack Obama, maka dapat diasumsikan bahwa penguasa demokrasi liberal sangat menghindari akan peperangan dan demokrasi menjadi seutuhnya pemenang di AS. namun nyatanya saat ini terjadi inkonsistensi akan hal itu. Banyak kasus yang bersifat inkonsistensi seperti kebijakan persenjataan/militer AS terhadap India yang tidak sesuai kesepakatan atau isi perjanjian, begitu juga konflik peperangan antara Israel dan Palestina di mana AS sebagai penggaung utama Hak Asasi Manusia (HAM) belum mampu konsisten terhadap kebijakan yang dibuatnya. Memang begitu tebal dinding kepentingan (*national interest*) AS sehingga belum mampu mendobrak inkonsistensi AS yang seharusnya konsisten terhadap kebijakannya.

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Timur Tengah, khususnya Iraq dan Suriah merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam metode invasi yang begitu radikal atau ekstrim yang terus mencaplok dan membuat sensasi. AS sebagai polisi

²Danial Darwis. 2015. *Kerangka kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Timur Tengah Pasa Arab Spring*. http://www.kompasiana.com/danial_darwis/kerangka-kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-terhadap-timur-tengah-pasca-arab-spring_54f74d32a33311ca2e8b459c. Diakses 15-12-2015 | 13.00 WIB.

dunia tidak mungkin berdiam diri karena hal-hal yang berkaitan dengan Timur Tengah menjadi isu yang selalu diperhitungkan pemerintah AS.

Dinamika Strategi ISIS, termasuk juga pembunuhan massal dan penculikan anggota kelompok keagamaan dan suku, pemenggalan tentara dan wartawan, memicu kekhawatiran dan kemarahan dunia dan campur tangan militer AS. Namun memusnahkan ISIS tidak semudah menginvasi Iraq dan Afganistan sehingga membuat delima pemerintah AS, ketangguhan ekonomi ISIS dan kelengkapan alat perang menjadi salah satu alasan membuat AS sedikit kalangkabut. Tetapi pergerakan AS yang lambat dalam mengambil sikap menjadi pertanyaan besar masyarakat dunia, solusi-solusi menghindari perang hingga sikap tidak *all out* seperti yang AS sudah lakukan terhadap Irak menjadi kontradiktif sehingga kritik pemerintah AS untuk lebih proaktif selalu hadir baik internal maupun eksternal pemerintah.³

Gerakan ISIS yang sudah meluas melewati batas Timur Tengah mengundang reaksi dari negara-negara yang menjadikannya sebagai kepentingan lobal, yang dimaksud kepentingan global tersebut adalah negara-negara bekerjasama karena adanya suatu permasalahan bersama yang perlu ditangani dunia Internasional. Di mana kepentingan global merupakan sebuah upaya mencapai kepentingan umum. Amerika Serikat sebagai pencetus koalisi internasional kini didukung banyak negara. Koalisi ini bertujuan untuk mencegah pergerakan ISIS yang akan meluas. Ini menunjukkan bahwa setiap negara merasa terancam dengan keberadaan ISIS sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk mencapai kepentingan global. Dalam kerjasama ini setiap negara memberikan bantuan kemiliteran dan bantuan kemanusiaan.

³ Septi Yani. 2014. *Sikap Amerika Serikat Terhadap Gerakan Islamic State Iraq and Syria* .Jakarta: Univeristas Prof. DR. Mostopo. Hal. 10.

AS terbiasa beraksi cepat terhadap ancaman kepentingan global AS di Timur Tengah, ini tidak lepas dari hitung-hitungan kepentingan nasional AS baik geopolitik maupun ekonomi.⁴ Berbagai ide dan dukungan berarti, bahwa dalam masalah keamanan dalam Kebijakan Luar Negeri khususnya Amerika tak terduga. Dan tidak jarang kebijakan AS bersifat inkonsisten membuat AS bukanlah negara panutan yang baik bagi dunia internasional. Kebijakan Luar Negeri pada dasarnya merupakan keseluruhan sikap dan aktivitas sebuah negara untuk menanggulangi masalah sekaligus memetik keuntungan dari lingkungan internasional. Dengan demikian, politik luar negeri sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestik dan lingkungan eksternalnya. Namun demikian, politik luar negeri suatu negara pasti ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional. Karena itu, ada dua unsur fundamental dari politik luar negeri, yaitu tujuan nasional dan alat untuk mencapainya. Ini pula yang mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara, termasuk Amerika Serikat.⁵

Oleh sebab itu, setiap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yang dikeluarkan dengan dalih untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, tetap saja pada dasarnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan nasional Amerika sendiri dan yang terpenting kebijakan tersebut dapat memenuhi atau menjadi jalan bagi pencapaian tujuan Amerika Serikat yang sesungguhnya.

Jika kita tela'ah kebelakang, keterlibatan AS dalam isu terorisme atau ekstrimisme seperti mata rantai yang tidak terputuskan dari kejadian tragedi 11 September hingga kini. AS seperti mendapatkan hantaman keras atas kejadian tersebut (*traumatic*), sejak hal itu AS berkomitmen akan selalu siap untuk memerangi segala bentuk radikalisme dan terorisme yang ada sekaligus mengancam keamanannya, serta

⁴ Taufik Adi Susilo. 2009. *Mengenal Amerika Serikat*. Yogyakarta: Grasai. Hal. 07

⁵ Sri Winingsih. 2009. *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat*. Jakarta: FISIP UI. (Wadjdi, Farid, "Politik Luar Negeri Amerika Pasca 'Tragedi WTC', posted on April, 15, 2008, <http://farid1924.wordpress.com/2008/04/15/politik-luarnegeri-amerika-pasca-%E2%80%98tragedi-wtc%E2%80%99/> diakses pada tanggal 23 September 2009).

dunia global. Amerika Serikat berdiri di garda terdepan sebagai negara *super power* yang tentunya akan mempertahankan hegemoninya baik secara *soft Power*, *hard power* dan *Smart power*.⁶

Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.⁷ Radikalisme memiliki keterkaitan dengan terorisme, meskipun memiliki definisi yang berbeda. Radikalisme adalah pemahaman yang bersifat ekstrim, sedangkan terorisme adalah berupa ancaman atau kegiatan separatis yang menggunakan kekerasan. Cara-cara kekerasan dan teror, adalah salah satu cara yang sering digunakan oleh kelompok radikal untuk mencapai tujuannya. Proses yang terjadi dalam radikalisme adalah radikalisasi, yang didefinisikan sebagai proses personal di mana individu mengadopsi idealisme, dan aspirasi politik, sosial, atau agama secara ekstrem, dalam pencapaian tujuannya membenarkan penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu, sehingga mempersiapkan seseorang atau kelompok untuk mencapai perilaku kekerasan.⁸

Kemudian terorisme adalah masalah definisi. Andreas Papandrou, Mantan Perdana Menteri Yunani, pernah menyatakan: “*one man’s terrorist is another man’s freedom fighter*”. Yang berarti bahwa teroris bagi satu orang bisa jadi pejuang bagi orang lain. Individu dapat menjadi teroris melalui radikalisasi di mana kemudian mengadopsi pemahaman kekerasan pada radikalisme sebagai taktik kegiatan. Kekerasan ekstrim menggambarkan tindakan kekerasan atas dasar keyakinan radikal, sehingga dengan kata lain, ketika pemahaman seseorang terhadap keyakinannya yang terdahulu

⁶ Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 118

⁷ <http://kbbi.web.id/radikalisme> diakses tanggal 20 November 2014

⁸ Adi Sulistyono. 2014. *Radikalisme Keagamaan Dan Terorisme*. Jakarta. Hal. 01

berubah menjadi pemahaman dalam konteks kekerasan, maka individu tersebut memiliki potensi untuk menjadi seorang teroris.⁹

Dalam fenomena ini penulis melihat adanya dinamika dalam invasi menjadi pengaruh besar terhadap proses kebijakan AS yang tidak hanya di lembaga legislatif saja, namun secara eksekutif yaitu hak prerogatif presiden AS yaitu Barack Obama sangat besar pengaruhnya terhadap Elastisitas Politik Luar Negeri AS itu sendiri. Kehadiran Presiden Obama telah memberi warna baru pada Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Barack Obama menjanjikan corak kemitraan AS yang baru di Timur Tengah sebagai awal diplomasi yang berakar dari “Saling Hormat dan Berbagi Kepentingan” dan dalam corak kemitraan ini begitu mudah terjadi berbagai polemik yang bersifat elastisitas.

Oleh karena itu, penulis mengali lebih dalam baik secara sistemik maupun analitik (non sistemik) dengan bagaimana proses pemerintah AS dengan konsistensi kebijakan institusinya yang menyatakan perang terhadap eksterisme atau terorisme serta penegakkan HAM yang kuat yang telah disepakati sepenuhnya yang kemudian terjadi inkonsistensi begitu saja. Dan sudah barang tentu hal ini berpengaruh terhadap AS secara persepsi dalam hubungan internasional.

⁹ Jerome P. Bjelopera. 2013. *American Jihadist Terrorism :Combating a Complex Threat*. Washington DC: Congressional Research Service. Hal. 02.

B. Tujuan Riset

Tujuan penulis mengangkat penelitian ini adalah :

1. Melacak sejarah pola hubungan kerjasama antara AS dengan jehadin Timur Tengah.
2. Menemukan data ilmiah atas upaya-upaya AS dalam membangun hegemoni dan invasi di Timur Tengah.
3. Mengetahui bentuk kebijakan luar negeri AS khususnya pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama.
4. Mengetahui berbagai dampak kebijakan AS terhadap ISIS.
5. Mengetahui peran AS di Timur Tengah terutama pada masa bangkitnya ISIS hingga kini.

C. Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfa'at seperti:

1. Menemukan secara rinci maksud yang sebenarnya dari elastisitas kebijakan invasi AS.
2. Memunculkan pemahaman baru terhadap dampak elastisitas kebijakan AS terhadap ISIS.
3. Memberikan referensi baru akan sikap dari pemerintahan AS dalam menghadapi gerakan radikalisme masa kini.

D. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan dengan pertanyaan yang bersifat struktural objektif yaitu: **Mengapa Politik Luar Negeri AS elastis terhadap isu Iraq, Suriah, dan ISIS?**

E. Tinjauan Pustaka

1. Elastisitas Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Demi mempertajam penelitian ini penulis meletak beberapa penelitian jurnal yang berkaitan langsung terhadap elastisitas Kebijakan AS seperti dalam jurnal Anthony H. Cordesman¹⁰ yang berjudul *The New "Great Game" in the Middle East: Looking Beyond the "Islamic State"* menyebutkan sekaligus menawarkan strategi realistik bagi AS yang seharusnya menemukan solusi jangka pendek tanpa harus berperang langsung terhadap ekstrimisme. Cara ini merupakan strategi penerimaan suatu kepentingan demi menghindari kompleksitas dan ketidakpastian baru. Permainan besar AS ini merupakan kepentingan untuk diterima seperti sikap politik dalam negeri, konsekuensinya AS harus mengambil risiko dan bahkan pilihan terbaik dinilai akan gagal. Hasil akhirnya, kebutuhan perang yang jelas untuk strategi yang lambat dan realis.

Kondisi yang lambat dan sabar ini (tarik ulur) merupakan sebuah perhitungan yang tidak jarang AS dipandang inkonsisten oleh dunia atau politik standar ganda menjadi cerita klasik masa lalu dan kini, sehingga dalam buku Sidik Jatmika¹¹ yang berjudul *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda* menjelaskan bahwa di balik retorika penegakan HAM dan demokrasi, banyak dipengaruhi kepentingan sendiri, yaitu kepentingan

¹⁰ Anthony H. Cordesman. 2014. *The New "Great Game" in the Middle East: Looking Beyond the "Islamic State"*.pdf

¹¹ Sidik Jatmika. 2000. *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda AS*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

akan manfaat bagi tujuan-tujuan tertentu bahkan sekalipun melanggar kaidah-kaidah HAM, sehingga pada hakikatnya sering mengabaikan kepedulian terhadap HAM manusia itu sendiri. Yang terpenting di antara kepedulian-kepedulian itu adalah kepentingan nasional dan global AS di bidang ekonomi, politik, dan strategi keamanan.

Kemudian dalam tesis Monica Dian Adelina¹² yang berjudul *Dinamika Politik Luar Negeri AS terhadap Kelompok Uighur* yang rumusan masalahnya sama-sama menanyakan mengapa terjadi inkonsistensi kepada Kebijakan AS ini berusaha menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadi dinamika kebijakan luar negeri AS terhadap kelompok Uighur, mahasiswa UI ini menyimpulkan bahwasanya dibalik inkonsistensi AS terhadap negara lain adalah adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai AS seperti kepentingan ekonomi dan strategis, kemudian dibalik inkonsistensi AS sangat membahayakan keamanan internasional dengan ada inkonsistensi tersebut justru memperkeruh hubungan AS dengan negara lain. Bisa dikatakan Kebijakan Luar Negeri AS tidak terprediksi dan terencana dengan baik.

2. Dinamika Strategi Kebijakan Amerika Serikat

Dalam penulisan Tesis ini penulis melacak lagi beberapa tesis mahasiswa lain seperti Pascasarjana dan Kedokteran di bidang Hubungan Internasional. Penulis mendapatkan beberapa penelitian yang sama dalam hal kebijakan AS terhadap Timur Tengah yaitu penelitian Mian Ahad Hayaud-Din (2003) mahasiswa dari University of South Florid yang berjudul *U.S. Foreign Policy in Islamic South Asia: Realism, Culture, and Policy Toward Pakistan and Afghanistan*, tujuan dari penelitian Mian ini untuk menguji apakah

¹²Monica Dian Adelina. 2012. *Dinamika Politik Luar Negeri AS terhadap Kelompok Uighur (2002-2012)*. Jakarta: FISIP UI.

penggunaan lanjutan dari teori realis diperkuat berdasarkan rekor keberhasilan dan kegagalan kebijakan masa lalu. Salah satu argumen inti terhadap realisme adalah bahwa tingkat analisis terlalu kaku, sehingga gagal untuk mengenali kendala internal dalam urusan negara. Dari sekian banyak masalah internal yang dihadapi negara, tidak lebih besar daripada peran budaya dalam konteks sosial di wilayah ini. Hal ini dicontohkan dalam studi kasus dari tiga peristiwa yang paling penting yang mempengaruhi kebijakan AS. Memeriksa dasar dan penerapan kebijakan berdasarkan realis menuju wilayah tersebut, penelitian ini kemudian akan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan AS. Evaluasi ini didasarkan pada analisis dari tujuan yang telah ditetapkan dibandingkan dengan hasil dari tindakan kebijakan.

Kemudian penulis menemukan lagi tulisan dari Scott Eric Kofmeh (2008) mahasiswa dari London School of Economics and Political Science yang berjudul *U.S. Foreign Policy and Post-Conflict State-Building*, tesis ini mengevaluasi Kebijakan Luar Negeri AS mengenai pasca konflik pada masa pembangunan negara, khususnya strategi AS dan perencanaan untuk periode pasca konflik langsung. Melalui pendekatan kelembagaan berdasarkan Allison & Zelikow Model II paradigma perilaku organisasi,¹³ tesis ini juga mengidentifikasi masalah sumber daya, dan kebijakan struktural yang menciptakan tantangan kelembagaan untuk pasca-konflik strategi pembangunan negara dan perencanaan dalam proses pembuatan Kebijakan Luar Negeri AS.

Dari uraian di atas ada beberapa persamaan subjek dan objek penelitian yang mengarah pada Timur Tengah. Apabila membicarakan kebijakan AS

¹³ Graham Allison & Philip Zelikow. 1999. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Second Edition*, New York: Longham. Hal. xi.

secara internal dan eksternal terhadap Timur Tengah bisa dikatakan hampir sama secara proses dengan penulis tesis ini, namun perbedaannya adalah pada objektif penelitian di mana penulis mengangkat judul *Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri AS terhadap ISIS (2013-2015)*. Oleh karena itu, perbandingan-perbandingan invasi sebagai modal primer penulis mengkaji kembali kebijakan AS yang bersifat inkonsisten. Sehingga ini menjadi ukuran penulis melacak kebijakan AS terhadap terorisme atau ekstrimisme masa kini.

F. Kerangka Pemikiran

1. Konsep

a. Kebijakan Politik Luar Negeri

Dalam memahami studi kebijakan politik luar negeri, kita harus berangkat dari sebuah lima unsur dasar ilmu politik. Dalam lima unsur tersebut adalah (1) Negara, (2) Kekuasaan, (3) Pengambilan keputusan, (4) Kebijakan, (5) Atribusi dan distribusi. Negara merupakan aktor yang bertanggung jawab dalam Kebijakan Luar Negeri, sedangkan kekuasaan (*power*) adalah reformulasi dari kemampuan Negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses kebijakan politik luar negeri sebuah Negara berakar dari sebuah keputusan artinya ketika dalam posisi ini penentuan Kebijakan Luar Negeri masih bersifat politis atau intra Negara. Selanjutnya dari hasil alternative yang terbaik maka itulah yang disebut sebagai kebijakan/kebijaksanaan atau alternative yang sudah di pilih oleh pemerintah yang sudah secara legal dan siap untuk di implementasikan. Dalam implementasi tersebut jika bersifat dalam negeri ini lah yang disebut sebagai kebijakan domestic (*domestic policy*). Tetapi jika sudah melintasi batas

tradisional kedaulatan Negara berupa wilayah maka fenomena ini sudah bersifat ke-HI-an dan menjadi studi hubungan internasional.¹⁴

Dalam studi kebijakan politik luar negeri ada banyak teori dan asumsi yang coba menjelaskan fenomena ini. Berangkat dari asumsi bahwa kebijakan politik luar negeri sebuah negara bukan hanya bisa dilihat dari kebutuhan politik domestik yang di tujukan kepada Negara lain, dan atau respon terhadap Negara lain dalam sebuah sistem internasional.

Dalam artian pendekatan yang ada sistemik dan analitik yang bertumpu pada kebutuhan internal dan eksternal. Namun yang perlu dipahami adalah Kebijakan Luar Negeri merupakan sebuah peristiwa yang *central mystery* yang akan susah ditebak objeknya secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada akan susah menemukan informasi yang 100% murni tentang proses perumusan Kebijakan Luar Negeri sebuah Negara. Objeknya memang ada tetapi sifatnya kabur. Seperti yang dijelaskan oleh Wolfram bahwa kebijakan politik luar negeri sebuah Negara adalah penyatuan dari kedua unsur internal dan eksternal.¹⁵

Sehingga Banyu Parawita dan Muhamad Yani menjelaskan pula kebijakan politik luar negeri sebuah Negara adalah *action theory*,¹⁶ kemudian T. May Rudi melanjutkan bahwa sisi variable dari kebijakan politik luar negeri bertumpu pada keputusan-keputusan (*decision*) dan kebijakan-kebijakan (*policies*), yang di asumsikan untuk pemilihan tujuan tertentu, pemilihan sarana dan cara implementasi.¹⁷ Kemudian disimpulkan oleh Holsti bahwa kebijakan politik luar negeri sebuah Negara terdiri ada empat komponen yakni: (1)

¹⁴ Fathun. 2015. *Materi Kuliah ke I Pengambilan keputusan dalam Hubungan Internasiona.l*. Makassar: UNIFA.

¹⁵ Warsito Tulus. 1998. *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing. Hal. 72.

¹⁶ Banyu Parawita dan Muhamad Yani. 2005. *Action Theory*. Hal. 47.

¹⁷ T May Rudy. 2003. *Studi Strategis, Transformasi Pasca Perang Dingin*. Bandung: Rafika Aditama. Hal. 89.

orientasi kebijakan politik luar negeri, peran nasional, (3) tujuan dan (4) tindakan.¹⁸

b. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Secara umum Kebijakan Luar Negeri Amerika di Timur Tengah bergerak di dua posisi eksklusif yang tidak sama. Pertama yaitu pendekatan global: AS beranggapan secara keseluruhan kesetabilan hubungan antara negara yang akan menghasilkan keseimbangan pada setiap negara Timur Tengah. AS berusaha membuat kebijakan negara pusat atau negara pengontrol (*state-centric*), dengan ikut campur tangan dalam masalah negeri negara Timur Tengah. Kedua yaitu AS mulai agresif mempromosikan demokrasi dengan politikus Islam di negara Timur Tengah, ini merupakan respon dari kebijakan AS dengan kebudayaan Arab yang anti- modern dan anti-Barat.¹⁹

Tabel 1: Daftar negara Timur Tengah

Daftar Negara Timur Tengah				
No.	Teluk	Arab Timur	Arab Barat	Aliran Sungai Nil & Semenanjung Afrika
1	Arab Saudi	Suriah	Maroko	Yaman
2	Emirat Arab	Libanon	Sahara Barat	Mesir
3	Oman	Palestina	Tunisia	Sudan
4	Qatar	Yordania	Aljazair	Somalia
5	Bahrain	Irak	Libiya	Djibaouti
6	Kuwait			Ethopia

Sumber: <http://nurekhun.favicon.ico>.

¹⁸ Holsti K J. 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga. Bab 4.

¹⁹ Yakub Hal.abi. 2009. *US Foreign Policy in the Middle East; from Crsisis to Change*. England: Asghate.

Selama tiga setengah dekade Kebijakan Luar Negeri AS terhadap Timur Tengah telah bergeser dari advokasi otoritarianisme, kapitalisme merangkul, dan akhirnya ke mempromosikan demokratisasi.²⁰ Pergeseran ini telah diberikan setelah ide-ide baru muncul untuk menggantikan yang lama, sehingga membenarkan pendekatan baru dalam kebijakan. Dua genre pendekatan teoritis menawarkan penjelasan untuk Kebijakan Luar Negeri Amerika di wilayah tersebut, yaitu 'struktural' dan 'budaya'.

Dalam pendekatan 'struktural', kita menemukan dua teori utama: neo-realisme atau stabilitas hegemonik dan saling ketergantungan. Konsepsi klasik hubungan internasional adalah di bawah kondisi anarki dalam sistem internasional, krisis meletus dan perang terjadi karena tidak ada organisasi supranasional yang mampu mengatur hubungan antara negara-negara berdaulat. Kebijakan Luar Negeri dilakukan dalam arena politik kekuasaan, di mana tidak ada mekanisme yang dapat diandalkan untuk mengkoordinasikan hubungan dan perselisihan peraturan.

Sedangkan 'budaya' adalah bagian dari legalisme-moralisme yang cenderung berbasis ideologis lebih cenderung menunjukkan sebuah etos budaya yang lebih dalam beserta nilai-nilainya. Nilai-nilai ini tertanam dalam gagasan inti dari kebesaran bangsa, berdampingan dengan perjuangan kebebasan individu dan kapitalisme demokratis di dalam dan luar negeri. Sebagian besar orang Amerika menganggap dirinya masyarakat yang superior dalam moral dan politik, bagai sebuah kota gemerlap di atas bukit, membawa misi universal dengan didorong anggapan diri yang merasa istimewa. Mereka yang tidak sepaham mengatakan, suatu Kebijakan Luar Negeri aktif yang ditujukan untuk

²⁰ *Ibid*

kebesaran bangsa-bangsa akan membahayakan kebebasan yang merupakan warisan kaum Republik.²¹

Menggunakan wacana Carrs sebagai landasan, Morgenthau menambahkan elemen berharga untuk pikiran realis. Menurut Morgenthau, realisme terdiri dari enam prinsip yang menggambarkan dan menjelaskan interaksi *state-to-state*: 1) politik Internasional didasarkan pada hukum-hukum objektif sifat manusia. 2) Kepentingan nasional mendorong perilaku negara untuk memaksimalkan kekuatan untuk mempertahankan diri. 3) Amerika mungkin berubah, tapi kepentingan nasional tetap konstan. 4) Moralitas tidak memandu perilaku negara. 5) Belum ada universal disepakati aturan perilaku. 6) Politik bercerai dari kegiatan negara lain.²² Ini mengarah langsung ke prinsip ketiga yang berhadapan dengan kepentingan nasional dan kelangsungan hidup negara. Prinsip ketiga ini mengidentifikasi dua tema yang merupakan nilai-nilai penting dalam hal dari kepentingan nasional yang berkaitan dengan kelangsungan hidup. Tema pertama adalah kebutuhan untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa yang diterjemahkan ke dalam keamanan nasional, atau pertahanan nasional dan kemampuan militer. Tema kedua yang terkait dengan kepentingan nasional adalah drive untuk memaksimalkan *power*.

Dalam relasi politik internasional dan proses menyertainya, tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan politik luar negerinya baru dimulai ketika negara A berusaha melalui berbagai tindakan strategis melalui instrumen yang terdiri dari pemberian bantuan luar negeri, propaganda, ancaman

²¹ Fawaz A. Gergez. *America and Political Islam : Clash of Civilization or Clash of Interest?* (Edisi Indonesia : Amerika dan Politik Islam : Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan ?), Jakarta : AlvaBet, Cet.1, September 2012, Hal.. 5-6.

²² Din Hayaud, Ahad Mian, "U.S. Foreign Policy in Islamic South Asia: Realism, Culture, and Policy Toward Pakistan and Afghanistan" (2003). Graduate Theses and Dissertations. Hal. 12-13.

embargo atau sanksi, tekanan ekonomi, persuasi dan sarana-sarana lainnya untuk mengubah atau mendukung perilaku negara lain.²³

Jika kita menelaah kembali politik luar negeri AS di kawasan Timur Tengah, maka tindakan AS yang perlu difokuskan bahwasanya AS membela kepentingan nasional yang mana dan bagaimana. Ada 2 pendekatan penting dalam menganalisa politik luar negeri AS di Timur Tengah yaitu Sistemik dan Analitik atau Sub-Sistemik, pendekatan sistemik mengawali analisa dari sistem dan menyimpulkan perubahan-perubahan sistem yang bersangkutan pada konteks yang (sering) dianggap sebagai faktor eksternal dari suatu negara yang politik luar negerinya sedang dianalisa. Tentu saja, faktor internal bukan berarti tanpa adanya sentuhan sama sekali. Kemudian untuk pendekatan analitik pada umumnya mengawali analisa dari konsep-konsep yang lebih bersifat internal seperti Teori-teori *Decision Making Process*, Teori *Power Elite*. Politik luar negeri AS sudah tentu banyak bentuk dan variasinya sehingga bisa saja menggunakan analisa perbandingan konstelasi eksekutif AS dengan berbagai asumsi-asumsi serta persepsi.²⁴

Dengan begitu dapat dipastikan ada hal yang diungkapkan oleh kedua pendekatan tersebut, yang kira-kira dapat dilukiskan sebagai sesuatu di antara yang eksternal dan yang internal. Menurut Wolfram²⁵ bahwa permasalahan yang paling esensial dalam politik luar negeri adalah kebijaksanaan dalam negeri sekaligus luar negeri, dan bukan salah satu di antaranya, hal inilah yang disebut sebagai “*central mister*”. Oleh sebab itu, peneliti riset ini berusaha secara

²³ K. J Holsti. 1983. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analissi*. Jakarta: Jilid 1 Erlangga. Hal. 170-171.

²⁴ Tulus Warsito. 1998. *Terori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya*. Yogyakarta: Bigraf Publishing. Hal.. 68-69.

²⁵ Wolfram F Hanrieder. 1971. *Comparative Foreign Policy, Theoretical essay*. New York: David Mc. Kay Company Inc.

metodologis menganalisis “*central mystery*” yang menuntut penulis menyatukan kedua pendekatan tersebut dengan lebih komprehensif atau disebut sebagai *Convergence Syndrome* yaitu syndrome pelebaran pendekatan eksternal dan internal.²⁶

c. Pragmatisme

Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani "pragma" yang berarti perbuatan atau tindakan. "Isme" di sini sama artinya dengan isme-isme yang lainnya yaitu berarti aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian pragmatisme berarti: ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kreteria kebenarannya adalah "faedah" atau "manfaat". Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori adalah benar *if it works* (apabila teori dapat diaplikasikan).²⁷

Pada awal perkembangannya, pragmatisme lebih merupakan suatu usaha-usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat dapat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis manusia. Sehubungan dengan usaha tersebut, pragmatisme akhirnya berkembang menjadi suatu metoda untuk memecahkan berbagai perdebatan filosofis-metafisik yang tiada henti-hentinya, yang hampir mewarnai seluruh perkembangan dan perjalanan filsafat sejak zaman Yunani kuno.²⁸ Dalam usahanya untuk memecahkan masalah-masalah metafisik yang selalu menjadi pergunjingan berbagai filosofi itulah pragmatisme menemukan suatu metoda yang spesifik, yaitu dengan

²⁶ *Ibid*

²⁷ Mohammad Najib Abdullah. 2004. *Pragmatisme: Sebuah Tinjauan Sejarah Intelektual Amerika*. Medan: Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara. Hal. 02.

²⁸ W. Guy Stroh. 1968. *American Philosophy*. Princenton: Duven Nostrand Company, Inc

mencari konsekuensi praktis dari setiap konsep atau gagasan dan pendirian yang dianut masing-masing pihak.²⁹

d. Pragmatisme Amerika Serikat

Dalam buku Albertine Minderop yang berjudul “Pragmatisme: Sikap Hidup dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat” mengamati dan menganalisis perkembangan politik luar negeri AS bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Amerika Serikat memiliki pandangan politik yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara lainnya. Hal tersebut menurut A.M lebih disebabkan oleh pragmatisme politik yang memadukan antara nilai-nilai idealisme dan realisme politik.³⁰ Dalam pendekatannya terhadap hubungan politik, baik domestik maupun internasional, pendekatan pragmatis menggunakan landasan yang berbeda, yakni menggunakan landasan politik tradisional melalui pendekatan pada filsafat politik, hukum dan institusi dan landasan politik behavioral dengan penekanan pada proses politik, perhitungan, dan prediksi.³¹ Dengan demikian dalam pragmatisme politik bagaimana negara dapat berfungsi, dalam arti segala konsekuensi dan tindakan selalu mengacu pada individu, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh. Bisa dikatakan politik Amerika Serikat berorientasi pada tujuan dan hasil yang akan diperoleh, dengan tidak memperhatikan cara atau mekanisme pencapaiannya.

Pragmatisme mengandalkan peran pengalaman manusia, pada realitas dan kemajemukan.³² Oleh karena itu pragmatisme bersifat terbuka, fleksibel, dan pluralistik. Kebenaran terletak pada konsekuensi praktis dari suatu tindakan, kemanfaatan dan kesejahteraan demi kepuasan manusia. Berdasarkan penjelasan

²⁹ *Ibid.* Hal. 02

³⁰ Albertine Minderop. 2006. *Pragmatisme: Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 113.

³¹ *Ibid.* Hal. 114

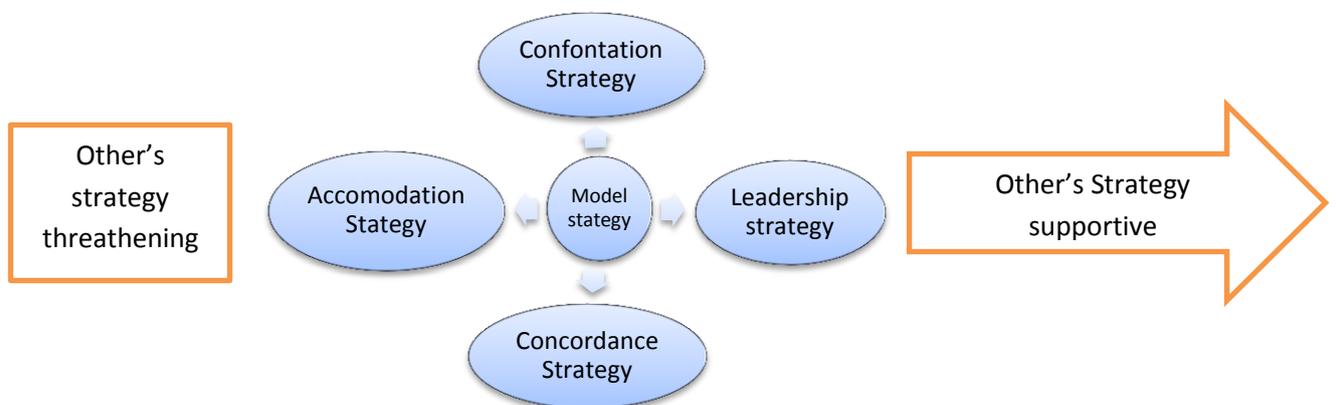
³² *Ibid.* Hal. 114

tersebut tidak mengejutkan apabila seringkali kita menemukan inkonsistensi dan kontroversi dalam Kebijakan Luar Negeri AS. dalam tulisan A.M berkesimpulan meskipun idealisme dan identitas dipertimbangkan dalam pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS, namun kepentingan secara pragmatis pada akhirnya memaksa AS pada kebijakan-Kebijakan yang ironis serta kontradiktif.

2. Model Kebijakan Luar Negeri

a. Wiliam D. Coplin

Tabel 2: Model Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin



Model ini dicetuskan oleh Wiliam D. Coplin.³³ Dalam model ini bisa di mainkan dalam keadaan damai maupun perang dalam hubungan internasional. **Srategi leadership** menyangkut cara pemimpin dalam menggunakan cara-cara tawa-menTABawar dalam merebut kepentingannya. Biasa menggunakan cara-cara persuasive walaupun terkadang bisa menggunakan kekerasan pula. Cara ini menitik beratkan pada kemampuan kepemimpinan seorang kepala Negara dalam merumuskan kepentingan Negara. Dalam model ini posisi Negara sangat superior atau lebih kuat dengan Negara lain.

Strategi Concordance menitik beratkan pada adanya keselarasan di antara actor-aktor yang berhubungan saling menguntungkan dan saling selaras dan

³³ William D. Coplin. 1971. *Introduction to International Politics : A Theoretical Overview*. Chicago: Markham Publishing Company. Hlm. 391.

menghindari ketidak sepahaman dalam politik internasional. **Strategi konfrontasi** menitik beratkan pada bagaimana salah satu actor mempertajam isu-isu konflik masa lalu karena menyadari sehingga menjadikan konfliktual dalam politik internasional. Untuk itu salah satu aktor harus menerapkan **Strategi akomodasi** untuk menengahi ketidak saling pahaman antar aktor.

G. Hipotesa

Politik Luar Negeri AS bersifat elastis terhadap isu Iraq, Suriah dan ISIS, karena AS menerapkan strategi:

1. Strategi kepemimpinan; AS memiliki pemimpin yang belum bisa mengakui secara tulus kesalahan-kesalahan inkonsistensial dalam membuat Kebijakan Luar Negerinya.
2. Strategi Korkondan; AS memiliki dinamika kompleksitas baik internal maupun eksternal atas Kebijakan Luar Negerinya sehingga kebijakan invasi terkesan tidak sesuai dengan misi menghentikan pergerakan ISIS.
3. Startegi Konfrontasi; AS telah menyerang ISIS di Irak dan Suriah pada tahun 2014, namun serangan itu terkesan melindungi kepentingan AS saja.
4. Startegi Akomodasi; Konsensus Rusia-Amerika demi penyelesaian konflik di regional Suriah dan Iraq.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif, kemudian:
 - a) Obyek Penelitian pemerintahan Amerika Serikat serta Kebijakan Luar Negeri AS.
 - b) Lokasi Penelitian yaitu American Corner UMY, IRC's U.S. Embassy Jakarta dan lembaga pengamat Kebijakan Luar Negeri AS Indonesia.
 - c) Jangkauan Penelitian dari keluarnya kebijakan-kebijakan AS dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Pada tahun 2013-2014, kebijakan AS adalah bekerjasama dengan Iran dalam memerangi ISIS, para analis politik mengungkapkan masalah utama dari koalisi global anti-ISIS tersebut. Kelemahan pertama dan utama dari strategi AS dalam menghadapi ISIS adalah sikap ambigu Washington terhadap masalah terorisme. Meskipun mengalami pengalaman pahit menghadapi al-Qaeda di Afghanistan, dan ISIS di Suriah, tapi ironisnya para pejabat AS tetap saja memaksakan untuk menggelontorkan bantuan kepada kelompok pemberontak moderat yang memerangi pemerintahan Damaskus. AS berharap dengan membantu kelompok oposisi bersenjata Suriah bisa menggulingkan Bashar Assad dari tampuk kekuasaan negara Arab itu.³⁴ Kelemahan kedua dari strategi AS menghadapi teroris terkait komposisi negara anggota koalisi global anti-ISIS yang dipimpin Washington. Sementara itu, negara-negara yang menjadi pemain utama dalam transformasi di kawasan Timur Tengah tidak bergabung dengan koalisi

³⁴ IRIB Indonesia/PH. 2014. *Kelemahan AS Perangi ISIS*.
http://indonesian.irib.ir/component/jcomments/feed/com_k2/86478

global yang dipimpin AS itu karena mereka tidak mempercayai motif AS dan sekutunya dalam memerangi ISIS.

Dengan berakhirnya tahun 2014 (2015), tampaknya koalisi pimpinan AS mengalihkan perhatian sebagian besar ancaman dari Presiden Suriah Bashar al-Assad kepada ISIS. Dengan beralihnya perhatian ini, dan kemungkinan dengan perubahan sikap itu, koalisi pimpinan AS dan Assad bisa melakukan kebijakan bersama menghadapi ISIS. Dorongan propaganda besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir ini, nampaknya melihat posisi Assad sebagai alternatif menghadapi kelompok ISIS. Di mana ISIS sekarang menguasai sejumlah wilayah yang luas di Suriah dan Irak. Di sisi lain, para pensiunan militer Amerika Serikat (AS) memberikan kritik keras terhadap kebijakan anti-teroris yang diambil oleh Barack Obama. Mereka menilai kebijakan yang diambil oleh Obama terlalu lembek, yang membuka celah bagi perkembangan terorisme.

- d) Sumber data terdiri dari data Primer dan Sekunder, data Primer yaitu Interview IRC'S U.S. Embassy sebagai perspektif praktisi, penggiat American Corner UMY sebagai perspektif akademisi, dan pengamat Kebijakan Luar Negeri AS di Indonesia sebagai perspektif jurnalistik. Kemudian data Sekunder yaitu dari berbagai buku, jurnal, artikel, serta data-data kredibel yang diperoleh dari internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data. Dengan demikian, maka tanpa mengetahui teknik

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu pengkajian:

a) Dengan cara pengakajian data:

Merekam (*Recording technique*), mengutip (*Noting technique*) dan mengganti/seleksi (*Changing technique*).

b) wawancara (*Questionere*)

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu Pedoman Wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan (*leading questions*). terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, di mana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.³⁵ Penelitian kualitatif bertujuan memahami lebih dalam tentang tingkah manusia dan dengan alasan bahwa pemerintahan itu bersifat seperti manusia. Metode kualitatif ini meneliti “mengapa” sebagai awal diskursus dan tidak hanya berpatokan kepada apa, di mana, dan kapan. Oleh sebab itu penarikan sedikit data atau contoh menjadi fokus terhadap studi kasus atau fonemena daripada hanya sekedar banyak data tetapi tidak fokus

³⁵ Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis data*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 30.

I. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian, yaitu:

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, kontribusi riset, rumusan masalah, originalitas riset, studi pustaka, kerangka teoritik, hipotesa, serta metodologi penelitian digunakan sebagai proposal atau langkah awal dari penelitian.

BAB II. Perkembangan dinamika Kebijakan Luar Negeri AS Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perkembangan dinamika Kebijakan Luar Negeri AS terhadap Timur Tengah dengan perbandingan kebijakan invasi di negara-negara Timur Tengah.

BAB III. Perkembangan dan Dampak pergerakan ISIS di suriah dan Iraq serta melacak seberapa besar pengaruh pergerakan ini terhadap kepentingan AS di Timur Tengah.

BAB IV. Membahas inkonsistensi kebijakan invasi AS terhadap ISIS dengan cara melacak sumber masalah dan mencari solusi dengan upaya internal yaitu konsensus regional Suriah dan Iraq, sehingga Kebijakan Luar Negeri AS menjadi dinamis dan utuh tanpa adanya rasa ketidakpercayaan negara-negara sukutu dan koalisi.

BAB V. Kesimpulan berisi rangkuman atau ringkasan berdasarkan pada hasil yang didapat dari penelitian.